



LAPORAN

KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA

PENGGUNA ANGGARAN BA.018

SEMESTER II TAHUN 2023

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN



Penerimaa
LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl. Ketindan No. 1 Lawang Malang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Malang, Januari 2024

Kepala BBPP Ketindan,

Ir. Sumardi Noor, M.Si

NIP 196401221994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.3. Basis Akuntansi.....	14
A.4. Dasar Pengukuran.....	14
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	23
B.2. Belanja.....	25
B.3. Belanja Pegawai.....	26
B.4. Belanja Barang.....	27
B.5. Belanja Modal.....	28
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	28
B.5.2. Belanja Modal Jaringan.....	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	30
C.1. Aset Lancar.....	30
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	30
C.1.2. Piutang Bukan Pajak.....	30
C.1.3. Persediaan.....	31
C.2. Aset Tetap.....	31
C.2.1. Tanah.....	31
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	31
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	32
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	32
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	33
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	33
C.3. Kewajiban Jangka Pendek.....	34
C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	34
C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihakan.....	34
C.3.3. Pendapatan Diterima di Muka.....	35
C.3.4. Uang Muka dari KPPN.....	35
C.4. Ekuitas.....	36
C.4.1. Ekuitas.....	36

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	37
D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	37
D.2.	Beban Pegawai.....	38
D.3.	Beban Persediaan.....	40
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	41
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	45
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	47
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	47
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	48
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	50
E.1.	Ekuitas Awal.....	50
E.2.	Surplus/Defisit-LO.....	50
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	50
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	50
E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	50
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	51
E.5.	Ekuitas Akhir.....	51
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	52
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	52
F.2.	BMN yang Disewakan kepada Pihak Ketiga.....	52
F.3.	Program Prioritas Nasional.....	52
F.4.	Akun Covid-19.....	52
F.5.	Jurnal Penyesuaian.....	53
F.6.	Kronologi Revisi Anggaran.....	53
F.7.	Rekening Pemerintah.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Laporan Keuangan
Lampiran II	:	Surat Hasil Rekonsiliasi
Lampiran III	:	Laporan Kuasa Pengguna Barang
Lampiran IV	:	Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Aset dan GLP
Lampiran V	:	Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan BAST
Lampiran VI	:	BMN
Lampiran VII	:	SK Penghapusan BMN
Lampiran VIII	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Pengeluaran
Lampiran IX	:	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Lampiran X	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Penerimaan
Lampiran XI	:	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Lampiran XII	:	Rekap PNBK 2023
Lampiran XIII	:	DIPA, Revisi DIPA dan POK
Lampiran XIV	:	SP2D Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran XV	:	Persetujuan Kembali atas Pembukaan Rekening
Lampiran XVI	:	SK Penetapan Pejabat
Lampiran XVII	:	Catatan Hasil Review Itjen

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, Januari 2024

Kepala BBPP Ketindan,



Ir. Sumardi Noor, M.Si

NIP 196401221994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp676.239.923,00 atau mencapai 111% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp610.986.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp13.194.611.198,00 atau mencapai 99,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.214.385.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp39.475.221.982,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.000,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp439.475.207.982,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.782.659,00 dan Rp39.449.439.323,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp678.366.568,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar

Rp15.384.264.261,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14.705.897.693,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp4.365.355,00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.701.532.338,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp41.634.320.822,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14.701.532.338,00, ditambah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp-1.720.436,00 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.518.371.275,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp39.449.439.323,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A	Pendapatan Negara Dan Hibah				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	610.986.000	676.239.923	110,68	1.036.635.260
	Jumlah Pendapatan Dan Hibah	610.986.000	676.239.923	110,68	1.036.635.260
B	Belanja				
	Belanja Pegawai	5.664.176.000	5.646.218.670	99,68	5.768.587.421
	Belanja Barang	7.284.546.000	7.283.814.528	99,99	6.969.547.124
	Belanja Modal	265.663.000	264.578.000	99,59	568.962.930
	Jumlah Belanja (B I + B li)	13.214.385.000	13.194.611.198	99,85	13.307.097.475

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	14.000	3.500.000
JUMLAH ASET LANCAR		14.000	3.500.000
Tanah	C.2.1.	13.890.000.000	13.890.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	18.284.559.745	18.157.616.745
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	31.657.617.820	31.657.617.820
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.974.951.500	1.837.316.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	173.451.242	173.451.242
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-26.505.372.325	-24.056.476.983
Jumlah Aset Tetap		39.475.207.982	41.659.525.324
Jumlah Aset		39.475.207.982	41.663.025.324
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1.	18.749.659	15.179.502
Pendapatan Diterima Dimuka	C.3.2.	7.033.000	13525000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.782.659	28.704.502
Jumlah Kewajiban		25.782.659	28.704.502
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.1	39.449.439.323	41.634.320.822
Jumlah Ekuitas		39.449.439.323	41.634.320.822
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		39.475.221.982	41.663.025.324

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	678.366.568	944.678.526
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.651.683.206	5.764.482.773
Beban Persediaan	D.3.	45.851.000	27.350.000
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.274.051.246	4.090.403.269
Beban Pemeliharaan	D.5.	996.282.980	1.007.021.994
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.646.972.923	1.623.128.346
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	322.248.000	229.969.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.447.174.906	2.379.271.925
JUMLAH BEBAN		15.384.264.261	15.121.627.807
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.9.	-14.705.897.693	-14.176.949.281
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0	59.122.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.		1.241.626
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	4.365.355	46.309.234
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.365.355	104.190.108
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14.701.532.338	-14.072.759.173

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal	E.1.	41.634.320.822,00	42.566.461.410,00
Surplus/Defisit-Lo	E.2.	-14.701.532.338,00	-14.072.759.173,00
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		-1.720.436,00	-161.343.630,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.	-1.720.436,00	(161.343.630,00)
Transaksi Antar Entitas	E.4.	12.518.371.275,00	13.301.962.215,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		-2.184.881.499,00	-932.140.558,00
Ekuitas Akhir	E.5.	39.449.439.323,00	41.634.320.822,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan adalah satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang didirikan untuk mendukung program-program pertanian Indonesia. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menetapkan visi jangka menengah 2020 – 2024, yaitu : “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan centre of excellent untuk mewujudkan SDM Pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing”.

Lembaga pelatihan terpercaya dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga pelatihan yang dipercaya mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya, sehingga setelah mengikuti pelatihan di BBPP Ketindan akan meningkat kompetensinya. Hal tersebut sesuai dengan janji maklumat layanan BBPP Ketindan “Dijamin kompetensi anda meningkat.” Lembaga Pelatihan terbaik dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga/balai pelatihan terbaik diantara balai-balai lain baik tingkat nasional maupun internasional. Centre of excellent, maksudnya adalah bahwa BBPP ketindan kedepan ingin menjadi pusat layanan unggulan dibidang pelatihan pertanian. SDM pertanian yang profesional, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. SDM pertanian yang mandiri, adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggungjawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. SDM pertanian yang berdaya saing, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.

Guna mewujudkan visi-visi tersebut, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan 25 kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;

2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ;
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usahatani;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing;
9. Memantapkan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

Tujuan yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode 2020 – 2024 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator “persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dengan target 60% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024);
2. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator “tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (skala likert)” dengan target 3,90 (tahun 2020) sampai dengan 3,94 (tahun 2024);
3. Peningkatan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan indikator “nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BBPP Ketindan” dengan target 33,25 (tahun 2020) sampai dengan (34,25 (tahun 2024);
4. Pengelolaan anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator “nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NOmor 195 Tahun 2018 (aplikasi SMART DJA)”, dengan target 90,00 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi Per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.000.000,00	40.000.000,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	271.210.000,00	271.210.000,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	176.790.000,00	287.776.000,00
Jumlah Pendapatan	500.000.000,00	610.986.000,00
Belanja		
Belanja gaji dan tunjangan PNS	5.800.897.000,00	5.664.176.000,00
Belanja barang operasional	2.358.496.000,00	2.409.354.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.747.558.000,00	1.572.476.000,00
Belanja Barang Persediaan	40.252.000,00	42.362.000,00
Belanja Jasa	532.720.000,00	294.335.000,00
Belanja Pemeliharaan	979.213.000,00	996.565.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.733.826.000,00	1.647.204.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	330.000.000,00	322.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.977.000,00	128.028.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	137.635.000,00
Jumlah Belanja	17.645.939.000,00	13.214.385.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp676.239.923,00 atau mencapai 110,68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp610.986.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.000.000,00	16.735.000,00	41,84
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	13.998.468,00	116,65
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	271.210.000,00	233.375.000,00	86,05
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	287.776.000,00	398.053.100,00	138,32
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	9.713.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.365.355,00	0,00
Jumlah	610.986.000,00	676.239.923,00	110,68

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar -36,42 % dibandingkan 31 Desember 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	16.735.000,00	22.022.000,00	-24,01
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	59.122.500,00	-100,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.998.468,00	34.316.508,00	-59,21
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	233.375.000,00	149.625.000,00	55,97
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	398.053.100,00	751.040.018,00	-47,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Lainnya	9.713.000,00	1.200.000,00	709,42
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.365.355,00	703.234,00	520,75
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		45.606.000,00	-100,00
Jumlah	676.239.923,00	1.063.635.260,00	-36,42

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan hasil pertanian seperti padi konsumsi, jagung manis, selada, kangkung dan sawi serta pengolahan hasil laboratorium di balai seperti manisan kencur, jahe instan dan pestisida nabati. Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan alih fungsi lahan menjadi *Smart Green House*
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa perolehan atas sewa rumah dinas dan Koperasi Batih. Pendapatan ini mengalami penurunan dikarenakan pembayaran sewa gedung koperasi telah dilakukan di tahun 2022 untuk periode tiga tahun ke depan.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berasal dari penggunaan sarana dan prasarana balai seperti ruang kelas, aula, sound system, asrama dan guest house.
4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah Pendapatan dari kontrak kerjasama pelatihan dengan BKPSDMP Kabupaten Tuban dan Kutai serta penyelenggaraan pelatihan fungsional pertanian ahli dan terampil.
5. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari jasa permagangan dan penelitian serta kunjungan wisata.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari setoran tunjangan fungsional umum pegawai yang telah menjalani tugas belajar dan pengembalian tunjangan fungsional widayaiswara yang telah beralih jabatan menjadi fungsional umum.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp13.194.611.198,00 atau 99,85% dari anggaran belanja sebesar Rp13.214.385.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.664.176.000,00	5.646.218.670,00	99,68
Belanja Barang	7.284.546.000,00	7.283.814.528,00	99,99
Belanja Modal	265.663.000,00	264.578.000,00	99,59
Total Belanja Kotor	13.214.385.000,00	13.194.611.198,00	99,85
Pengembalian Belanja	0	0	
Total Belanja	13.214.385.000,00	13.194.611.198,00	99,85

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -0,85% yang disebabkan oleh penurunan belanja pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan telah memasuki masa purna tugas. Belanja modal mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya nilai belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal pada tahun ini diantaranya jaringan listrik, televisi, komputer, meja, kursi makan, AC dan Scanner.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	5.646.218.670,00	5.768.587.421,00	-2,12
Belanja Barang	7.283.814.528,00	6.969.547.124,00	4,51
Belanja Modal	264.578.000,00	568.962.930,00	-53,50
Total Belanja	13.194.611.198,00	13.307.097.475,00	-0,85

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.646.218.670,00 dan Rp5.768.587.421,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -2,12% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dua orang pegawai yang memasuki masa purna tugas yaitu Nurlala dan Juniawan.
2. Dua orang pegawai mengalami sakit dan tidak masuk kerja sehingga tidak diberikan uang makan.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.646.584.143,00	5.769.988.886,00	-2,14
Jumlah Belanja Kotor	5.646.584.143,00	5.769.988.886,00	-2,14
Pengembalian Belanja Pegawai	365.473,00	1.401.465,00	-73,92
Jumlah Belanja	5.646.218.670,00	5.768.587.421,00	-2,12

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.283.814.528,00 dan Rp6.969.547.124,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,51% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang operasional mengalami penurunan pada komponen Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dikarenakan telah ditetapkan Kepres No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia per 21 Juni 2023 sehingga sisa anggaran terkait Covid-19 harus dialihkan untuk kegiatan lainnya. Belanja barang jasa mengalami penurunan yang disebabkan oleh dominasi pengajar eksternal untuk pelatihan di balai yang berasal dari satker Kementerian Pertanian sehingga tidak diberikan honor pengajar eksternal. Belanja pemeliharaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya anggaran pemeliharaan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja pemeliharaan.
2. Peningkatan belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, dan belanja perjalanan dalam negeri yang merupakan imbas dari peningkatan jumlah pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan Balai.
3. Adanya realisasi belanja barang diserahkan kepada masyarakat pada TA 2023 yang lebih banyak dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.409.302.069,00	2.458.026.317,00	-1,98
Belanja Barang Non Operasional	1.572.438.454,00	1.283.264.522,00	22,53
Belanja Barang Persediaan	42.351.000,00	22.000.000,00	92,50
Belanja Jasa	294.205.102,00	346.136.445,00	-15,00
Belanja Pemeliharaan	996.296.980,00	1.007.021.994,00	-1,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.646.972.923,00	1.629.266.446,00	1,09
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemd	322.248.000,00	229.969.500,00	40,13
Jumlah Belanja Kotor	7.283.814.528,00	6.975.685.224,00	4,42
Pengembalian Belanja Barang	0	6.138.100,00	-100,00
Jumlah Belanja	7.283.814.528,00	6.969.547.124,00	4,51

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp264.578.000,00 dan Rp568.962.930.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar -53,50% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh nilai belanja modal pada tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang melakukan pembelanjaan jaringan Listrik, perbaikan saluran air, pengeboran air dan peralatan mesin lainnya. Tahun 2023 ini, belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa televisi, meja makan, kursi makan, scanner, AC, printer dan komputer.
2. Belanja Modal Jaringan Listrik.

Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.943.000,00	245.107.930,00	-48,21
Belanja Modal Jaringan	137.635.000,00	146.855.000,00	-6,28
Belanja Modal Lainnya		177.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	264.578.000,00	568.962.930,00	-53,50
Pengembalian Belanja Modal		0	0,00
Jumlah Belanja	264.578.000,00	568.962.930,00	-53,50

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp126.943.000,00 dan Rp245.107.930,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar -48,21% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 lebih kecil dibandingkan TA 2022 yaitu berupa televisi, meja makan, kursi makan, scanner, AC, printer dan komputer.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.943.000,00	245.107.930,00	-48,21
Jumlah Belanja Kotor	126.943.000,00	245.107.930,00	-48,21
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	126.943.000,00	245.107.930,00	-48,21

B.5.2. BELANJA MODAL JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp137.635.000,00 dan Rp146.855.000,00. Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2023 mengalami penurunan sebesar -6,28% dibandingkan TA 2022. Belanja Modal Jaringan pada periode ini adalah penambahan daya listrik untuk proyek K-Smart.

Perbandingan Belanja Jaringan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	137.635.000,00	146.855.000,00	-6,28
Jumlah Belanja Kotor	137.635.000,00	146.855.000,00	-6,28
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	137.635.000,00	146.855.000,00	-6,28

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1.1. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.000,00 dan Rp3.500.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada periode ini adalah bahan untuk pemeliharaan berupa sapu lidi. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0,00	3.500.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	14.000,00	0,00
Jumlah	14.000.00	3.500.000.00

C.2. ASET TETAP**C.2.1. Tanah**

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,890,000,000.00 dan Rp13,890,000,000.00. Tanah tersebut seluas 47.334 m² dan telah memiliki sertifikat hak pakai nomor 7 yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.284.559.745,00 dan Rp18.157.616.745,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18.157.616.745,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	126.943.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0
Saldo per 31 Desember 2023	18.284.559.745,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-16.608.723.095,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.675.836.650,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa televisi, meja dan kursi makan, AC, scanner, printer serta komputer.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.657.617.820,00 dan Rp31.657.617.820,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	31.657.617.820,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2023	31.657.617.820,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	8.961.479.637,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	22.696.138.183,00

Tidak ada mutasi gedung dan bangunan pada periode ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.974.951.500,00 dan Rp1.837.316.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.837.316.500,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	137.635.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.974.951.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	935.169.593,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.039.781.907,00

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pemasangan jaringan listrik untuk proyek K-Smart.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp173,451,242.00 dan Rp173,451,242.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	173,451,242.00
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	173,451,242.00

Tidak ada mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada periode ini. Aset tetap lainnya ini meliputi buku-buku, maket dan atlas.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-26.505.372.325,00 dan Rp-24.056.476.983,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.285.559.745,00	-16.608.723.095,00	1.676.836.650,00
2.	Gedung dan Bangunan	31.657.617.820,00	-8.961.479.637,00	22.696.138.183,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.974.951.500,00	-935.169.593,00	1.039.781.907,00
4.	Aset Tetap Lainnya	173.451.242,00		173.451.242,00
	Total	52.091.580.307,00	-26.505.372.325,00	25.586.207.982,00

C.3. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.749.659,00 dan Rp15.179.502,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	5.464.536,00	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	13.285.123,00	15.179.502,00
Jumlah	18.749.659,00	15.179.502,00

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar merupakan kenaikan gaji berkala a.n Solikin dan Suparjo periode Januari 2022 s.d Desember 2023 yang diajukan pembayarannya pada bulan Januari 2024 dengan total senilai Rp5.464.536,00, sedangkan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar terdiri atas:

- Pemakaian Listrik bulan Desember 2023 yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp13.165.392,00.

- b. Pemakaian telepon bulan Desember 2023 yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp119.731,00.

C.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.033.000,00 dan Rp13.525.000,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang diterima di kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi atas penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut, dimana dalam periode ini tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima balai.

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Diterima Dimuka	7.033.000,00	13.525.000,00
Jumlah	7.033.000,00	13.525.000,00

C.4. EKUITAS

C.4.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.449.439.323,00 dan Rp41.634.320.822,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp678.366.568,00 dan Rp944.678.526,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	16.735.000,00	22.022.000,00	-31,59
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.490.468,00	20.791.508,00	-1,47
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	233.375.000,00	149.625.000,00	35,89
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	398.053.100,00	751.040.018,00	-88,68
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9.713.000,00	1.200.000,00	87,65
Jumlah	678.366.568,00	944.678.526,00	-39,26

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan hasil pertanian dan pengolahan hasil laboratorium di balai. Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan alih fungsi lahan menjadi *Smart Green House*
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa perolehan atas sewa rumah dinas dan Koperasi Batih. Pendapatan ini mengalami penurunan pada sewa rumah dinas dikarenakan pegawai yang menempati rumah dinas tersebut telah memasuki masa purna tugas.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berasal dari penggunaan sarana dan prasarana balai seperti ruang kelas, aula, sound system, asrama dan guest house.
4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah Pendapatan dari kontrak kerjasama pelatihan dengan BKPSDMP Kabupaten Tuban dan Kutai serta penyelenggaraan pelatihan fungsional pertanian ahli dan terampil.

5. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari jasa permagangan dan penelitian serta kunjungan wisata.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LO senilai Rp678.366.568,00 sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA senilai Rp676.239.923,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp2.126.245,00 berupa pengakuan pendapatan sewa gedung bangunan diterima di muka oleh Koperasi Batih sebesar Rp6.492.000,00 dikurangi dengan penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp4.365.355,00. Rincian atas selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya antara LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Akun	Nama Akun	LO	LRA	Selisih
425112	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Budidaya	16.735.000	16.735.000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.490.468	13.998.468	6.492.000
425151	Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	233.375.000	233.375.000	0
425421	Pendidikan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	398.053.100	398.053.100	0
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9.713.000	9.713.000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		4.365.355	-4.365.355
		678.366.568	676.239.923	2.126.645

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.651.683.206,00 dan Rp5.764.482.773,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara.

Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.788.754.860,00	3.840.033.860,00	-1,35

Beban Pembulatan Gaji PNS	52.829,00	56.216,00	-6,41
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	324.085.564,00	319.037.344,00	1,56
Beban Tunj. Anak PNS	98.388.306,00	98.142.928,00	0,25
Beban Tunj. Struktural PNS	41.705.000,00	39.130.000,00	6,17
Beban Tunj. Fungsional PNS	505.502.000,00	564.702.000,00	-11,71
Beban Tunj. PPh PNS	30.526.987,00	35.311.445,00	-15,67
Beban Tunj. Beras PNS	229.788.660,00	229.498.980,00	0,13
Beban Uang Makan PNS	540.854.000,00	551.495.000,00	-1,97
Beban Tunjangan Umum PNS	92.025.000,00	87.075.000,00	5,38
Jumlah	5.651.683.206,00	5.764.482.773,00	-2,00
Pengembalian	0	0	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0,00	0,00
Total	5.651.683.206,00	5.764.482.773,00	-2,00

1. Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunjangan Fungsional PNS, Beban Tunjangan PPh PNS dan Beban Tunjangan Uang Makan PNS mengalami penurunan dikarenakan ada dua orang PNS dengan jabatan fungsional widyaiswara telah memasuki masa purna tugas dan dua orang pegawai yang mengalami sakit serta tidak masuk kerja sehingga tidak diberikan uang makan.
2. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS, Beban Tunjangan Anak PNS, Beban Tunjangan Struktural PNS, Beban Uang Makan PNS, Beban Tunjangan Beras PNS dan Beban Tunjangan Umum PNS mengalami kenaikan dikarenakan adanya PNS yang mengalami kenaikan pangkat, mutasi masuk pegawai baru yang gajinya dibayarkan melalui balai mulai tahun 2023 dan pengangkatan tiga orang CPNS menjadi PNS yang berpengaruh terhadap kenaikan gaji.

Realisasi Beban Pegawai pada LO senilai Rp5.651.683.206,00 sedangkan Belanja Pegawai pada LRA senilai Rp5.646.218.670,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp5.464.536,00. Selisih tersebut berupa kekurangan gaji pegawai bulan Januari 2022 s.d Desember 2023 a.n Solikin dan Suparjo yang diajukan pembayarannya pada bulan Januari 2024. Rincian atas selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Beban/Belanja Pegawai antara LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
511111	Beban Gaji Pokok PNS	3.788.754.860,00	3.783.962.060,00	4.792.800
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	52.829,00	52.085,00	744
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	324.085.564,00	323.606.284,00	479.280
511122	Beban Tunj. Anak PNS	98.388.306,00	98.196.594,00	191.712
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	41.705.000,00	41.705.000,00	0
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	505.502.000,00	505.502.000,00	0
511125	Beban Tunj. PPh PNS	30.526.987,00	30.526.987,00	0
511126	Beban Tunj. Beras PNS	229.788.660,00	229.788.660,00	0
511129	Beban Uang Makan PNS	540.854.000,00	540.854.000,00	0
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	92.025.000,00	92.025.000,00	0
	Jumlah	5.651.683.206,00	5.646.218.670,00	5.464.536,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp45.851.000,00 dan Rp27.350.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	45.851.000,00	27.350.000,00	40,35
Jumlah	45.851.000,00	27.350.000,00	40,35

Beban Persediaan Konsumsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya kegiatan di balai sejak dinyatakan berakhirnya pandemi COVID-19. Realisasi Beban Persediaan Konsumsi pada LO sebesar Rp45.851.000,00 sedangkan pada LRA Belanja Persediaan Konsumsi sebesar Rp42.351.000,00. Selisih sebesar Rp3.500.000,00 adalah saldo awal persediaan barang konsumsi per 1 Januari

2023 berupa Buku Katalog Pengolahan Hasil II sebanyak 14 buah. Rincian atas selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Beban/Belanja Persediaan antara LO dan LRA

Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA / Neraca Percobaan Kas (Rp)	Selisih (Rp)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	45.851.000	42.351.000	3.500.000

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.274.051.246,00 dan Rp4.090.403.269,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.465.671.454,00	1.225.057.522,00	16,42
Beban Barang Non Operasional Lainnya	98.817.000,00	47.407.000,00	52,03
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.320.000,00	119.143.200,00	-175,03
Beban Barang Operasional Lainnya	1.178.813.847,00	1.107.429.856,00	6,06
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99.192.000,00	83.424.000,00	15,90
Beban Honor Output Kegiatan	7.950.000,00	10.800.000,00	-35,85
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	10.688.000,00	0
Beban Jasa Lainnya	17.600.000,00	79.920.000,00	-354,09
Beban Jasa Profesi	30.150.000,00	33.000.000,00	-9,45
Beban Keperluan Perkantoran	1.084.376.222,00	1.146.865.261,00	-5,76

Beban Langganan Listrik	162.314.088,00	159.025.876,00	2,03
Beban Langganan Telepon	1.621.635,00	1.928.554,00	-18,93
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000,00	1.164.000,00	67,67
Beban Sewa	80.625.000,00	64.550.000,00	19,94
Jumlah	4.274.051.246,00	4.090.403.269,00	4,30

1. Beban Bahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan harga barang untuk keperluan pelatihan seperti ATK, fotocopy dan pelaporan.
2. Beban Barang Non Operasional Lainnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelatihan yang diselenggarakan Balai sehingga berdampak pada P3K dan perlengkapan penunjang lainnya untuk keperluan pelatihan.
3. Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dikarenakan telah dinyatakan berakhirnya pandemi COVID 19 di Indonesia sehingga berdampak terhadap berkurangnya belanja kebutuhan multivitamin, *handsanitizer* dan aneka penambah daya tahan tubuh untuk pegawai.
4. Beban Barang Operasional Lainnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan peningkatan kebutuhan untuk operasional lahan praktek, instalasi laboratorium dan perkantoran.
5. Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami peningkatan dikarenakan pemberian honor pejabat pembuat komitmen yang berasal dari non fungsional keuangan.
6. Beban Honor Output Kegiatan berupa honor panitia mengalami penurunan dikarenakan jumlah pelatihan yang diselenggarakan di luar Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang memerlukan kepanitiaan di luar Balai, lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
7. Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sudah ditiadakan pada periode ini dikarenakan sudah tidak diberlakukan antigen sebagai persyaratan perjalanan luar kota.
8. Beban Jasa Lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini beban tersebut hanya digunakan untuk pembayaran *surveillance* /ISO 9001.
9. Beban Jasa Profesi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan dominasi pengajar dari instansi dinas pertanian dan Kementerian

Pertanian untuk pelatihan yang berpengaruh terhadap menurunnya realisasi honor penceramah dan pengajar eksternal.

10. Beban Keperluan Perkantoran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan penurunan anggaran.
11. Beban Langganan Listrik mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kebutuhan akan penggunaan Listrik untuk aktivitas perkantoran dan kediklatan mengalami peningkatan.
12. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya penurunan penggunaan telepon dan beralih pada jaringan internet.
13. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pengiriman Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) kepada peserta.
14. Beban Sewa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya sewa kendaraan sehubungan dengan bertambahnya pelatihan yang dilaksanakan di balai.

Beban Barang dan Jasa yang tercatat dalam LO sebesar Rp4.274.051.246,00, sedangkan Belanja Barang dan Jasa yang tercatat dalam LRA sebesar Rp4.275.945.625, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.894.379,00. Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Beban Langgan Listrik sebesar Rp1.885.186,00 berasal dari selisih pembayaran belanja listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 yaitu belanja listrik screen house BBPP Ketindan sebesar Rp1.567.068,00 dan listrik asrama dan kantor BBPP Ketindan sebesar Rp 13.483.510,00 dengan beban Listrik bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Januari 2024 sebesar Rp13.165.392,00.
2. Selisih Beban Langganan Telepon sebesar Rp9.193,00 berasal dari Rp128.924,00 merupakan belanja telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 dengan selisih beban telepon bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai Rp119.731,00.

Perbandingan Beban/Belanja Barang dan Jasa antara LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
521211	Beban Bahan	1.465.671.454,00	1.465.671.454,00	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	98.817.000,00	98.817.000,00	0
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.320.000,00	43.320.000,00	0
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.178.813.847,00	1.178.813.847,00	0

521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99.192.000,00	99.192.000,00	0
521213	Beban Honor Output Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	0
522191	Beban Jasa Lainnya	17.600.000,00	17.600.000,00	0
522151	Beban Jasa Profesi	30.150.000,00	30.150.000,00	0
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.084.376.222,00	1.084.376.222,00	0
522111	Beban Langganan Listrik	162.314.088,00	164.199.274,00	-1.885.186
522112	Beban Langganan Telepon	1.621.635,00	1.630.828,00	-9.193
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000,00	3.600.000,00	0
522141	Beban Sewa	80.625.000,00	80.625.000,00	0
	Jumlah	4.274.051.246,00	4.275.945.625,00	(1.894.379)

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp996.282.980,00 dan Rp1.007.021.994,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	593.197.000,00	508.280.000,00	14,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	372.668.980,00	461.555.994,00	-23,85
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	30.417.000,00	37.186.000,00	-22,25
Jumlah	996.282.980,00	1.007.021.994,00	-1,08

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan akan pemeliharaan gedung dan bangunan secara periodik pada tahun berkenaan. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan menyesuaikan kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan maupun peralatan dan mesin kantor lainnya. Beban Pemeliharaan Persediaan bahan untuk pemeliharaan mengalami penurunan menyesuaikan jumlah pemakaian bahan persediaan untuk keperluan operasional asrama.

Beban Pemeliharaan yang tercatat dalam LO sebesar Rp996.282.980,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan yang tercatat dalam LRA sebesar Rp996.296.980,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp14.000,00. Selisih tersebut berasal dari saldo akhir bahan untuk pemeliharaan per 31 Desember 2023 berupa 2 buah sapu lidi sebesar Rp14.000,00.

Perbandingan Beban/Belanja Pemeliharaan antara LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	593.197.000,00	593.197.000,00	0
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	372.668.980,00	372.668.980,00	0
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	30.417.000,00	30.431.000,00	-14.000
	Total	996.282.980,00	996.296.980,00	-14.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.646.972.923,00 dan Rp1.623.128.346,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	972.643.814,00	1.139.940.962,00	-17,20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	409.889.109,00	334.867.384,00	18,30
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	264.440.000,00	148.320.000,00	43,91
Jumlah	1.646.972.923,00	1.623.128.346,00	1,45

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa mengalami penurunan dibandingkan periode yang lalu karena berkurangnya anggaran.
2. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota mengalami peningkatan menyesuaikan asal daerah pengajar atau peserta yang mengikuti pelatihan.
3. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berbagai pelatihan yang diselenggarakan di luar balai telah direalisasikan pada periode ini.

Beban Perjalanan Dinas dalam LO sebesar Rp1.646.972.923,00, sedangkan di LRA terdapat Rp1.646.972.923,00 sehingga tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

Perbandingan Beban/Belanja Perjalanan Dinas antara LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
524111	Beban Perjalanan Biasa	972.643.814,00	972.643.814,00	0
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	409.889.109,00	409.889.109,00	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	264.440.000,00	264.440.000,00	0
	Total	1.646.972.923,00	1.646.972.923,00	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp322.248.000,00 dan Rp229.969.500,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	322.248.000,00	229.969.500,00	40,13
Jumlah	322.248.000,00	229.969.500,00	40,13

Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat berupa meja kursi, televisi, laptop, speaker, LCD, blender, mesin selep, tripod dan gerobak dorong yang

telah diserahkan kepada P4S dengan BAST terlampir. Beban Barang untuk Diserahkan di Masyarakat sebesar Rp322.248.000,00 sedangkan Belanja Barang untuk Diserahkan di Masyarakat di LRA sebesar Rp322.248.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.447.174.906,00 dan Rp2.379.271.925,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.599.280.861,00	1.599.280.859,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	26.565.065,00	26.565.066,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	49.354.222,00	49.354.222,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	28.530.931,00	22.884.329,00	19,79
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		6.026.306,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	743.443.827,00	675.161.143,00	9,18
Jumlah	2.447.174.906,00	2.379.271.925,00	2,77

1. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Irigasi dan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan bersifat statis karena tidak ada mutasi tambah ataupun kurang pada periode ini.

2. Beban Penyusutan Jaringan mengalami kenaikan setelah diadakannya penambahan jaringan berupa penambahan daya listrik untuk proyek *K-Smart* pada periode ini.
3. Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah tidak ada dalam periode ini dikarenakan aset tetap tersebut telah dihapuskan
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penambahan BMN sehingga menambah nilai penyusutan.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	59.122.500,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	-1.241.626,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	45.606.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.365.355,00	703.234,00	83,89
Jumlah	4.365.355,00	104.190.108,00	-2286,75

Tidak terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang umumnya berasal dari penjualan aset yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam periode ini. Sedangkan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode ini berasal dari:

1. Tunjangan widyaiswara selama bulan Agustus s.d Desember 2022 a.n Roikhan Bustanul Effendi, SP karena yang bersangkutan beralih jabatan sebagai fungsional umum sebesar Rp. 1.775.000,00
2. Pengembalian Tunjangan Umum a.n Pipin Kiswanti, SE selama bulan Januari s.d Desember 2022 dan Tunjangan umum bulan 13 dan 14 sebesar Rp 2.590.000,00 dikarenakan yang bersangkutan menjalani tugas belajar.
3. Pembayaran kekurangan gaji TA 2021 dan 2022 a.n Arif Budiman dan Teguh Wijayanto dan kekurangan gaji TA 2022 a.n Isdianto dengan total Rp355,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.634.320.822,00 dan Rp42.566.461.410,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-14.701.532.338,00 dan Rp-14.072.759.173,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-1.720.436,00 dan Rp-161.343.630,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-1.720.436,00 dan Rp-161.343.630,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi pada periode ini berasal dari selisih akumulasi penyusutan jaringan listrik yang semula diajukan dengan NUP yang berbeda dengan pengajuan penambahan jaringan listrik pada tahun sebelumnya.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.518.371.275,00 dan Rp13.301.962.215,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Uraian	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.194.611.198,00
Diterima dari Entitas Lain	676.239.923,00
Jumlah	12.518.371.275,00

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.449.439.323,00 dan Rp41.634.320.822,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. BMN YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

Terdapat BMN yang disewakan kepada KPRI Batih yang dibayarkan pada Tanggal 8 Februari 2022 untuk masa 3 Tahun senilai Rp19.476.000,00.

F.3 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Terdapat tiga program prioritas nasional di BBPP Ketindan meliputi:

1. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan kode output SCC. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur dengan Pagu program sebesar Rp983.822.000,00 dan sudah terealisasi 99,99%, yaitu sebesar Rp983.741.012,00. Target yang ingin dilayani sebesar 231 orang dan sudah terealisasi 100% yaitu 231 orang. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur dengan pagu program sebesar Rp1.253.449.000,00 dan sudah terealisasi 100% sebesar Rp1,253.409.406,00. Target yang ingin dilayani sebesar 510 orang dan sudah terealisasi 100% sebanyak 510 orang.
2. Sertifikasi Profesi dan SDM dengan kode output PDI. Pagu program ini sebesar Rp375.084.000,00 dan sudah terealisasi 99,97%, yaitu sebesar Rp374.989.712,00. Target yang ingin dilayani sebanyak 120 orang dan sudah terealisasi 100% yaitu 120 orang.
3. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga dengan kode output QDB. Pagu program ini sebesar Rp376.193.000,00 dan sudah terealisasi 100%, yaitu sebesar Rp376.179.884,00. Target yang ingin dilayani sebanyak 11 lembaga dan sudah terealisasi 100% yaitu 11 lembaga.

F.4. AKUN COVID-19

Terdapat satu akun Covid-19 yaitu akun 521131. Akun 521131 adalah Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 yang peruntukannya untuk pembelian Suplemen, Handsanitizer, vitamin dan lain-lain dengan pagu awal sebesar Rp119.156.000,00. Pagu tersebut direvisi menjadi Rp43.320.000,00 sesuai jumlah realisasi pada semester 1 TA 2023 dikarenakan sudah berakhirnya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

F.5. JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL MANUAL

Terdapat jurnal penyesuaian khusus pada bulan Januari 2023 yang merupakan jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian yang dilakukan pada periode 31 Desember 2022 yaitu:

1. Pendapatan sewa diterima di muka atas sewa gedung balai oleh KPRI Batih yang diakui per 31 Desember 2022 senilai Rp13.525.000,00.
2. Belanja atas Listrik screen house Bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp1.567.068,00
3. Belanja atas listrik asrama dan kantor BBPP Ketindan bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp13.483.510,00.
4. Belanja atas telepon Bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp128.924,00.

Terdapat jurnal penyesuaian khusus pada bulan Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa diterima di muka atas sewa gedung balai oleh KPRI Batih yang diakui per 31 Desember 2023 senilai Rp7.033.000,00
2. Belanja atas listrik asrama dan kantor BBPP Ketindan bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai Rp13.165.392,00.
3. Belanja atas telepon Bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai Rp119.731,00.
4. Belanja kekurangan gaji dua orang pegawai bulan Januari 2022 s.d Desember 2023 yang diajukan pembayarannya bulan Januari 2024 senilai Rp5.464.536,00 yang meliputi:
 - a. Belanja gaji pokok PNS Rp 4.792.800,00
 - b. Belanja Pembulatan gaji PNS Rp744,00
 - c. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Rp479.280,00
 - d. Belanja Tunjangan Anak PNS Rp191.712,00

Terdapat jurnal manual karena kesalahan pencatatan beban persediaan barang konsumsi yang seharusnya masuk ke dalam beban persediaan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.863.500,00.

F.6. KRONOLOGI REVISI ANGGARAN

0. DIPA AWAL TAHUN 2023 (30 NOVEMBER 2022)

1. KRONOLOGIS REVISI DIPA I ANGGARAN TAHUN 2023 (27 Desember 2022)

Adanya Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 423.191.000 yang terdiri dari

- Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp. 412.684.000,00 yang diambil dari output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dari komponen Pelatihan bagi Aparatur dengan sub komponen Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Obat bagi Aparatur di Provinsi Jawa Timur yang berupa belanja bahan sebesar Rp. 93.384.000,00 dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp. 319.300.000,00
- Pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 10.507.000,00 yang diambil dari belanja gaji pokok PNS

2. KRONOLOGIS REVISI DIPA II ANGGARAN TAHUN 2023 (24 Januari 2023)

Refocusing anggaran Kegiatan Bimtek bagi Petani dan Penyuluh sebanyak 6 paket 360 orang sebesar Rp. 600.000.000,00 dan penambahan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 yang digunakan untuk penambahan jaringan listrik kegiatan K-Smart. Sehingga nilai DIPA BBPP Ketindan yang semula Rp. 17.645.939.000,00 menjadi Rp. 17.195.939.000,00

3. KRONOLOGIS REVISI DIPA III ANGGARAN TAHUN 2023 (14 Pebruari 2023)

Revisi DIPA Hal III dimana untuk menyesuaikan antara rencana penarikian dan realisasi anggaran dalam Triwulan I TA. 2023.

4. KRONOLOGIS REVISI DIPA IV ANGGARAN TAHUN 2023 (2 Maret 2023)

Adanya refocusing anggaran dikarenakan realokasi pelatihan yaitu Pelatihan bagi Kader Petani Milenial yang semula 2.245 orang dengan anggaran sebesar Rp. 3.321.550.000,00 menjadi 1.020 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.334.350.000,00 sehingga nilai DIPA BBPP Ketindan yang semula Rp. 17.195.939.000,00 menjadi Rp. 15.218.739.000,00

5. KRONOLOGIS REVISI DIPA V ANGGARAN TAHUN 2023 (15 April 2023)

Adanya refocusing anggaran pelatihan yaitu Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 390 orang dengan anggaran sebesar Rp 514.338.000 dimana yang semula 1020 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.334.350.000,00 menjadi 630 orang dengan anggaran sebesar Rp 830.012.000,00 sehingga nilai DIPA BBPP Ketindan yang semula Rp. 15.218.739.000,00 menjadi Rp. 14.704.401.000,00.

6. KRONOLOGIS REVISI DIPA VI ANGGARAN TAHUN 2023 (9 Mei 2023)

1. Adanya pergeseran anggaran PNPB yang semula pada KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke KRO Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 129.077.000,- dikarenakan adanya Kerjasama pelatihan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Tuban yaitu untuk Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kab. Tuban sebesar Rp. 47.300.000,- sebanyak 30 orang dan Pelatihan Teknis Pertanian Organik bagi Aparatur Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 81.777.000,- sebanyak 30 orang, sehingga ada penambahan target 60 orang pada RO Pelatihan Bokasi Pertanian bagi Aparatur.
2. Adanya refocusing anggaran Pelatihan Kewirausahaan yang semula 34 angkatan, 1020 orang sebesar Rp. 1.344.350.000,- menjadi 4 angkatan, 120 orang sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Adanya penghapusan anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Petani sebesar Rp. 34.250.000,- yang dialihkan ke kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Program Kementerian Pertanian.

7. KRONOLOGIS REVISI DIPA VII ANGGARAN TAHUN 2023 (27 Juni 2023)

Revisi DIPA Hal III dimana untuk menyesuaikan antara rencana penarikan dengan realisasi anggaran dalam Triwulan II TA. 2023 dan adanya penambahan anggaran pada belanja tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) sebesar Rp. 82.000,-.

8. KRONOLOGIS REVISI DIPA VIII ANGGARAN TAHUN 2023 (17 Juli 2023)

Adanya refocusing anggaran (AA) terkait belanja gaji pokok pegawai sebesar Rp. 10.507.000,- dimana pagu anggaran BBPP Ketindan yang semula sebesar Rp. 16.611.705.000,- menjadi Rp. 13.601.198.000,-.

9. KRONOLOGIS REVISI DIPA IX ANGGARAN TAHUN 2023 (28 Juli 2023)

1. Adanya pergeseran anggaran PNPB yang semula pada KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke KRO Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 117.626.000,- dikarenakan adanya Kerjasama pelatihan gabungan dari kabupaten yaitu untuk pelatihan sehingga ada penambahan target 60 orang pada RO Pelatihan Bokasi Pertanian bagi Aparatur.
4. Adanya refocusing anggaran Pelatihan Kewirausahaan yang semula 34 angkatan, 1020 orang sebesar Rp. 1.344.350.000,- menjadi 4 angkatan, 120 orang sebesar Rp. 150.000.000,-
5. Adanya penghapusan anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Petani sebesar Rp. 34.250.000,- yang dialihkan ke kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Program Kementerian Pertanian.

10. KRONOLOGIS REVISI DIPA X ANGGARAN TAHUN 2023 (23 Agustus 2023)

Revisi DIPA Hal III dimana untuk menyesuaikan antara rencana penarikan dengan realisasi anggaran dalam Triwulan III TA. 2023

11. KRONOLOGIS REVISI DIPA XI ANGGARAN TAHUN 2023 (21 September 2023)

Adanya refocusing anggaran terkait belanja gaji pokok pegawai sebesar Rp. 19.990.000,- dimana pagu anggaran BBPP Ketindan yang semula sebesar Rp. 13.696.645.000,- menjadi Rp. 13.676.655.000,-.

12. KRONOLOGIS REVISI DIPA XII ANGGARAN TAHUN 2023 (13 Oktober 2023)

Revisi DIPA Hal III dimana untuk menyesuaikan antara rencana penarikan dengan realisasi anggaran dalam Triwulan IV TA. 2023

13. KRONOLOGIS REVISI DIPA XIII ANGGARAN TAHUN 2023 (31 Oktober 2023)

Adanya refocusing anggaran terkait belanja gaji pokok pegawai sebesar Rp. 102.824.000,- dan penambahan anggaran pemeliharaan Gedung dan bangunan pada operasional perkantoran sebesar Rp. 46.100.000,- dimana anggaran BBPP Ketindan berkurang sebesar Rp. 56.724.000,- sehingga pagu anggaran BBPP Ketindan yang semula sebesar Rp. 13.676.655.000,- menjadi Rp. 13.619.931.000,-.

14. KRONOLOGIS REVISI DIPA XIV ANGGARAN TAHUN 2023 (24 Nopember 2023)

Adanya refocusing anggaran sebesar Rp 405.546.000,- yang terdiri dari :

- Program Dukungan Manajemen (Gaji dan Operasional Perkantoran) berkurang sebesar Rp. 101.650.000,-
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Koordinasi, Sarana Bidang Pertanian, Sertifikasi, Penguatan Kelembagaan P4S, Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur) berkurang sebesar Rp. 303.896.000,-

Sehingga pagu anggaran BBPP Ketindan yang semula Rp. 13.619.931.000,- menjadi Rp. 13.214.385.000,-

15. KRONOLOGIS REVISI DIPA XV ANGGARAN TAHUN 2023 (29 Nopember 2023)

Revisi terkait penambahan belanja gaji pokok yang diambilkan dari sisa belanja gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 1.800.000,- dan penyesuaian rencana penarikan DIPA halaman III yang disesuaikan sampai dengan bulan Desember 2023.

16. KRONOLOGIS REVISI DIPA XVI ANGGARAN TAHUN 2023 (14 Desember 2023)

Revisi terkait pemanfaatan sisa penggunaan anggaran yang berasal dari PNBPN sebesar Rp. 5.982.000,- dan penyesuaian rencana penarikan DIPA halaman III yang disesuaikan sampai dengan bulan Desember 2023.

17. KRONOLOGIS REVISI DIPA XVII ANGGARAN TAHUN 2023 (27 Desember 2023)

Revisi penyesuaian DIPA halaman III sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan evaluasi Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA.

F.7. REKENING PEMERINTAH

Rekening bendahara pengeluaran mengalami penggantian menjadi virtual account, yang nomor rekening bendahara yang lama berganti dari nomor rekening 1440011747927 menjadi 8100122396541000 an. BPG Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada PT Bank Mandiri KCP Lawang sesuai surat persetujuan Pembukaan kembali rekening dari KPPN Tipe A1 Jakarta nomor: S-1271/WPB.12/KP.05/2020, Tanggal 29 Juni 2020. Rekening bendahara penerimaan bernomor 1440015234633 a.n BPN 032 BBPP KETINDAN (239654) Bank Mandiri KCP Lawang sesuai surat persetujuan No. S-3250/WPB.16/KP.032/2015.

F.8. TRANSAKSI RESIPROKAL

Terdapat transaksi resiprokal dengan PUSDIKLAT ANRI berupa pembayaran Diklat Arsiparis a.n Nur Chotimah sebesar Rp6.790.000,00 yang telah tercatat sebagai transaksi resiprokal belanja pada aplikasi SAKTI modul GLP.